



# Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol.15, No.2, Desember 2018

## KONSTELASI POLITIK DI TAHUN ELEKTORAL

- Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018
- Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal
- Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017
- Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)
- Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019
- Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi
- Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia
- *Marketing* Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018

### RESUME PENELITIAN

- Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung
- Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

### REVIEW BUKU

- Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 2	Hlm. 129-320	Jakarta, Desember 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)  
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)  
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

**Dewan Redaksi**

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si  
Yusuf Maulana, SAP

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom  
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com  
*Website*: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• <b>Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018</b> Moch. Nurhasim	129–142
• <b>Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal</b> Lili Romli	143–160
• <b>Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017</b> Agus Sutisna dan Idil Akbar	161–178
• <b>Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)</b> Firman Noor	179–196
• <b>Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019</b> Ridho Imawan Hanafi	197–213
• <b>Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi</b> Sri Budi Eko Wardani	215–231
• <b>Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia</b> Sri Yanuarti	233–248
• <b>Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018</b> M. Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri	249–265
Resume Penelitian	
• <b>Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung</b> Kurniawati Hastuti Dewi, dkk	267–288
• <b>Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi</b> Aisah Putri Budiatri, dkk	289–306
Review Buku	
• <b>Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik</b> Mouliza K.D Sweinstani	307–317
Tentang Penulis	319–320
Pedoman Penulisan	321–325

## CATATAN REDAKSI

Konstelasi politik menjelang tahun elektoral menjadikan dinamika politik baik di tingkat nasional maupun lokal menarik untuk dikaji.

*Jurnal Penelitian Politik* nomor ini menyajikan 8 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama berjudul “Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018” yang ditulis oleh Moch. Nurhasim. Artikel ini membahas tentang Pilkada serentak 2018 yang menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya dan bahkan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Artikel kedua ditulis oleh Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, memperlihatkan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan “mahar politik” yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.

Artikel berikutnya ditulis oleh Agus Sutisna dan Idil Akbar berjudul “Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017” membahas mengenai kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada.

Artikel keempat yakni “Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018” ditulis oleh Firman Noor. Artikel ini membahas beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya kondisi negatif dari eksistensi partai politik terkait dengan pilkada. Fenomena ini adalah tidak hadirnya sosok kepala daerah yang merupakan pimpinan partai di daerah itu, masih kuatnya peran jaringan non-partai dalam kontestasi politik, hingga dominasi pragmatisme dalam menentukan koalisi yang kerap menyingkirkan idealisme atau ideologi partai yang secara keseluruhannya memperlihatkan kerentanan partai di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan hal-hal yang menyebabkan itu semua. Selain itu tulisan ini menawarkan beberapa solusi agar berbagai kelemahan itu dapat teratasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada di kemudian hari.

Artikel selanjutnya membahas tentang “Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019” yang ditulis oleh Ridho Imawan Hanafi. Artikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih.

Sementara itu, artikel “Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi” yang ditulis oleh Sri Budi Eko Wardani yang membahas mengenai Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009 membawa perubahan dramatis pada hubungan representasi politik pasca-Orde Baru. Terjadi perubahan dalam persepsi wakil terhadap konstituen dari sekadar formalitas menjadi politis untuk kepentingan pemilu berikutnya. Persepsi terhadap konstituen memengaruhi tindakan wakil di daerah pemilihan. Tulisan ini fokus pada persepsi wakil terhadap konstituen di tingkat lokal era reformasi, dengan studi kasus Anggota DPRD Banten 2014-2019, serta menggunakan teori lingkaran konsentrik konstituensi dari Richard Fenno, dan teori representasi yang merujuk pada Hanna Pitkin.

Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti berjudul “Militer dan Pemilu-pemilu di Indonesia” membahas mengenai keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim kemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka

dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik.

Artikel terakhir yakni ditulis oleh Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri berjudul “Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018” membahas mengenai isu agama yang menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai bagian dalam pembentukan perilaku memilih, sentimen dan isu agama muncul dan digunakan di 7 pilkada sepanjang 2015-2018.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2017. Naskah pertama ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi, “Modal, Strategi Dan Jaringan Perempuan Politisi Dalam Kandidasi Pilkada Langsung”. Tulisan ini menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi melalui jalur partai politik, sebagai pintu masuk yang harus dapat ditembus oleh politisi perempuan untuk maju dalam Pilkada langsung. Melalui analisis mendalam terhadap dua perempuan politisi di Grobogan dan Lampung Timur, buku ini menggarisbawahi pentingnya tiga hal yaitu modal berupa modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan yang harus dimiliki dan mampu dimainkan oleh perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam Pilkada langsung.

Naskah kedua, “Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi”, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Tulisan ini membahas mayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi yang telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi

penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Danny Hayes & Jennifer L. Lawless, “Mitos Dan Realita Perempuan Dalam Pemilu: Pelajaran Dari Situasi Politik Amerika Di Era Polarisasi Politik”. *Review* yang ditulis Mouliza K.D Sweinstani menelaah respon dari situasi politik Amerika yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam kehidupan politik Amerika Serikat khususnya dalam dua pemilu sela pada tahun 2010 dan 2014. Buku ini juga memberikan cara pandang baru terhadap area politik di era terpolarisasi di Amerika Serikat dengan berusaha membongkar pemahaman konvensional mengenai bias yang harus dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Selain itu buku ini juga berusaha mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebab masih adanya pemahaman bias gender dalam area politik di Amerika Serikat. Hanya saja, simpulan dari buku ini perlu digunakan secara hati-hati agar pembaca tidak melakukan generalisasi atas kondisi politik yang telah dianggap netral gender dan tidak diskriminatif seperti yang terjadi di Amerika. Pembaca

sebaiknya mengontekskan kondisi lanskap politik masing-masing agar dapat menghasilkan temuan yang mengelaborasi temuan Hayes dan Lawless. Dengan demikian, hal ini dapat memperkaya studi-studi tentang kampanye politik, media dan kandidat perempuan dalam kajian ilmu politik.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu politik di tahun elektoral. Selamat membaca.

Redaksi

# **MARKETING ISU AGAMA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA 2015-2018**

## **RELIGIOUS ISSUES MARKETING IN INDONESIA LOCAL ELECTION 2015-2018**

**M. Fajar Shodiq Ramadhan**

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya  
Email: fajarramadhan@ub.ac.id

**Romel Masykuri**

Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga  
Email: romel.masykuri@gmail.com

Diterima: 2 September 2018; Direvisi: 28 September 2018; Disetujui: 30 Desember 2018

### **Abstract**

*Religious issues become one of the strategic instruments in election contestation in Indonesia, especially in local elections. As part of the formation of voting behavior, religious sentiment and issues emerged in 7 local elections in 2015-2018. In political marketing strategies, there are two types of content: first, the invitation to choose leaders with the same religion, or the prohibition to choose leaders from different religions; and second, black campaign. The production of religious issues (content) is inseparable from two contexts: the local socio-political context and the context of competitors in the elections. The local socio-political context is related to historical contexts, such as sentiments and experiences of religious conflict in the past. This context is linked to religious issues (content) to discredit political opponents and used through black campaigns. In the context of competitors, religious issues appear if there is a candidate with a minority background. The minority candidate's identity is a source for producing the issues. Religious issues are used through the prohibition of choosing leaders from different religious backgrounds (content). The religious issues that emerged in the 2015-2018 local election in Indonesia have ways, forms and patterns in which content and context are interrelated.*

**Keywords:** *religious issues, political marketing, local election*

### **Abstrak**

Isu agama menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai bagian dalam pembentukan perilaku memilih, sentimen dan isu agama muncul dan digunakan di 7 pilkada sepanjang 2015-2018. Dalam strategi marketing politik, terdapat dua jenis konten, yakni ajakan untuk memilih pemimpin seagama, atau larangan untuk memilih pemimpin yang berbeda agama; dan *black campaign*. Produksi isu agama (konten) tidak lepas dari dua konteks: sosial-politik di level lokal/daerah dan konteks kompetitor dalam pilkada. Konteks sosial-politik lokal, berkaitan dengan konteks historis, seperti sentimen dan pengalaman konflik agama di masa lalu. Konteks ini dihubungkan dengan isu-isu (konten) untuk mendiskreditkan lawan politik dan digunakan melalui *black campaign*. Sedangkan dalam konteks kompetitor, isu agama muncul jika terdapat salah satu kandidat berlatarbelakang minoritas. Identitas minoritas kandidat menjadi sumber

untuk memproduksi isu agama. Isu agama digunakan melalui larangan memilih pemimpin dari latar belakang agama berbeda (konten). Isu agama yang muncul di sepanjang penyelenggaraan pilkada 2015-2018 memiliki cara, bentuk dan pola dimana konten dan konteks saling berkaitan.

**Kata Kunci:** isu agama, *marketing* politik, pemilihan kepala daerah

## Pendahuluan

Isu agama menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Keterkaitan agama dan politik menjadi problematik manakala berkaitan dengan partikularitas politik lokal, misalnya munculnya isu identitas, seperti sentimen agama, etnisitas, putra daerah dan mayoritas-minoritas.

Sebagai bagian dari perkembangan demokrasi pasca reformasi di Indonesia, pilkada merefleksikan perubahan paradigmatis dan kemajuan besar. Partisipasi politik terbuka luas untuk menentukan kepala daerah. Semenjak diselenggarakan pertama pada 2005, mulai 2015 pilkada dilakukan secara serentak di beberapa daerah.

**Tabel 1.** Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, 2017 dan 2018

No	Level Pelaksanaan Pilkada	Jumlah
<b>Tahun 2015</b>		
1	Provinsi	9
2	Kabupaten	224
3	Kota	36
<b>Total</b>		269
<b>Tahun 2017</b>		
1	Provinsi	7
2	Kabupaten	76
3	Kota	18
<b>Total</b>		101
<b>Tahun 2018</b>		
1	Provinsi	17
2	Kabupaten	115
3	Kota	39
<b>Total</b>		171

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber

Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2015, 2017 dan 2018. Tahun 2015, terdapat 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 di tingkat kota. Tahun 2017, jumlah daerah yang

menyelenggarakan pilkada lebih sedikit, yakni 101 daerah, terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten dan 101 kota.<sup>1</sup> Sedangkan di tahun 2018, terdapat 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada, yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.<sup>2</sup> Total pilkada yang diselenggarakan selama tiga tahun tersebut berjumlah 541 pilkada.

Jika dilihat berdasarkan latar belakang keagamaan kandidat, dalam sejarah penyelenggaraan pilkada di Indonesia, terdapat beberapa kandidat yang berlatar belakang agama minoritas. Beberapa diantaranya bahkan memenangkan pilkada, seperti Zulkarnaen Damanik (Islam-Batak) di Pilkada Simalungun tahun 2005, dimana penduduk mayoritas berasal dari agama Kristen dan Batak; Basuki Tjahaja Purnama (Protestan-Tionghoa) yang menang di Pilkada Kabupaten Belitung Timur tahun 2005 dimana mayoritas penduduknya adalah Islam dan Melayu.

Berkaitan dengan sentimen keagamaan, Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menjadi salah satu pilkada yang menarik perhatian beberapa sarjana politik.<sup>3</sup> Bukan saja karena Jakarta adalah ibukota dan memiliki persentase kelas menengah dan atas tertinggi di Indonesia, tetapi Pilkada DKI Jakarta juga diwarnai dengan sentimen dan isu identitas: soal pemimpin muslim-non-muslim,

<sup>1</sup> Kompas, "Pilkada Serentak Pembelajaran Demokrasi." 13 Februari 2017.

<sup>2</sup> Kompas.com. "Infografis: Fakta Seputar Pilkada Serentak," 23 Juni 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/23/21473321/infografis-fakta-seputar-pilkada-serentak-2018>, diakses pada 07 Juli 2018.

<sup>3</sup> Lihat: Marcus Mietzner, dan Burhanuddin Muhtadi, "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation", *Asian Studies Review*, vol. 42, issue 3, (2018); Okamoto Masaaki dan Jun Honna, "Intorudction: "Local" Politics in Jakarta: Anomaly from Indonesia's Local Politics?", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33, 1, (2014).

etnisitas, pribumi–non-pribumi dan gerakan-gerakan yang digagas oleh ormas-ormas Islam.

Hal ini yang kemudian memberi perhatian terhadap sentimen identitas (terutama agama) dan penggunaan isu agama dalam pilkada. Artikel ini berfokus pada bagaimana isu-isu agama digunakan dalam kontestasi pilkada serentak (2015-2018). Di bagian pertama, artikel ini terlebih dahulu menjelaskan soal keterkaitan antara dengan perilaku memilih dalam pemilu di Indonesia. Bagian kedua menjelaskan tentang *marketing* politik dalam konteks pilkada. Bagian selanjutnya menjelaskan analisis tentang konten dan konteks penggunaan isu-isu agama sebagai bagian dari strategi *marketing* politik pada pilkada serentak.

Dalam upaya untuk melihat apakah terdapat isu agama yang berlangsung selama pilkada, dilakukan penelusuran dan pengumpulan pemberitaan di media massa dan literatur terkait pilkada di 541 daerah sepanjang 2015 hingga 2018. Melalui berita dan literatur tersebut, dilakukan pemilahan proses pilkada yang terdapat isu agama di dalamnya. Selanjutnya dilakukan pengidentifikasian isu (konten) dan konteks penggunaan isu agama.

### **Agama, Aktivitas Politik dan Perilaku Memilih**

Sarjana politik meyakini bahwa pasca Perang Dunia Kedua terjadi peningkatan sekularisasi dan masyarakat yang progresif, terutama di negara-negara Barat dimana industrialisasi dan demokrasi telah berjalan cukup mapan. Kehidupan modern dinilai akan mengikis intensitas dan otoritas agama.<sup>4</sup> Namun, dalam beberapa dasawarsa terakhir, keterkaitan antara agama, organisasi keagamaan dengan politik elektoral justru menjadi perhatian penting baik di negara-negara demokrasi maju maupun negara-negara demokrasi baru.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Lihat Ronald Inglehart, *Culture Shift in Advanced Industrial Society*, (Princeton: Princeton University Press, 1990); Russell J. Dalton, *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Western Democracies*. 2nd edition, (London: Chatham House, 1996)

<sup>5</sup> Pippa Norris dan Ronald Inglehart, "Islamic Culture and Democracy: Testing the 'Clash of Civilizations' Thesis", dalam *Comparative Sociology*, vol.1, issue 3-4, (2002).

Lipset,<sup>6</sup> menjelaskan bahwa semakin besar keterlibatan individu dalam agama, semakin besar peran yang dimainkan oleh organisasi keagamaan dalam sosialisasi politiknya. Status sosio-ekonomi rata-rata anggota gereja di negara-negara Barat mempengaruhi cara individu dalam memilih dan berafiliasi dengan partai politik serta gerakan sosial tertentu. Anggota kelas pekerja dalam kelompok agama yang relatif kaya, cenderung memilih secara konservatif. Sementara anggota kelas menengah dari gereja-gereja yang kurang berpendidikan, lebih memilih untuk ke "kiri". Lipset menemukan bahwa anggota agama mayoritas cenderung memilih partai-partai "kanan", sementara anggota kelompok agama minoritas cenderung lebih memilih partai-partai "kiri". Meskipun Lipset tidak berfokus pada institusi, melainkan pada aspek perilaku individu, Lipset menunjukkan bahwa kondisi institusi/organisasi mempengaruhi kompetisi antar kelompok/status yang membentuk preferensi politik.

Begitu pula dalam konteks Indonesia. Karakter religius masyarakat Indonesia memiliki konsekuensi penting secara politis. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, agama juga bagian dari sosialisasi dan mendorong partisipasi sosial-politik. Kegiatan sosial di Indonesia sering bertepatan dengan kegiatan sosial keagamaan yang dimotivasi oleh keyakinan agama. Dalam interaksi kegiatan keagamaan tersebut, masyarakat bukan saja mendengarkan nasihat keagamaan, tetapi juga belajar dan memperoleh informasi tentang politik. Mereka juga terinspirasi dan termotivasi untuk memperoleh informasi tentang urusan-urusan publik, salah satunya pemilu.<sup>7</sup>

Dalam tradisi komunitas agama dan kesukarelaan sipil tersebut, masyarakat juga menjadi tertarik mengikuti isu-isu politik, lebih banyak membahas politik, tertarik pada partai atau figur politik. Dalam konteks tersebut, warga akhirnya terdorong berpartisipasi aktif

<sup>6</sup> Seymour Martin Lipset, *Political Man: The Social Bases of Politics*, (New York: Feffer and Simon Inc, 1960).

<sup>7</sup> Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskritho Ambardi, "Voting Behavior in Indonesia since Democratization", dalam *Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

dalam kegiatan politik, termasuk pemilu dan partai politik. Lebih jauh, hal tersebut kemudian membentuk cara pandang, berfikir dan bertindak secara sosial dan politik, yang menjadikan agama sebagai salah satu cara menilai bagaimana politik secara ideal. Proses internalisasi nilai-nilai tersebut juga mengarahkan pada keberpihakan politik.

Hal tersebut dapat diamati pada keterlibatan masyarakat dalam organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Tarbiyah, organisasi gereja, dan sebagainya. Baik dalam komunitas maupun dalam kelompok yang lebih terlembaga tersebut, masyarakat lebih memungkinkan dan siap untuk dimobilisasi berdasarkan ikatan dalam kelompok tersebut.<sup>8</sup> Dengan demikian, tidak mengherankan jika agama terus memainkan peran penting dalam politik di Indonesia.

Soal bagaimana keterkaitan antara keyakinan beragama dan preferensi politik elektoral, setidaknya dapat dilihat pada Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) tahun 2017 tentang 3 Tahun Jokowi: Kenaikan Elektoral dan Kepuasan Publik. Pada survei itu, ketika responden ditanya perihal penerimaan terhadap pemimpin yang berbeda agama, sebanyak 58,4% responden menyatakan tidak bisa menerima dan 39,1% menyatakan bisa menerima.<sup>9</sup>

Hal sama juga dapat diamati pada survei yang dilakukan lebih dari satu dekade ke belakang. Survei LSI tahun 2006 di Pilkada Kota Manado dan Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa latarbelakang agama kandidat menjadi bagian penting dari preferensi pemilih. Di Manado, dengan mayoritas penduduk beragama Kristen Protestan, ketika ditanya seberapa penting Walikota Manado sebaiknya orang yang beragama Kristen Protestan, sebanyak 45,5% responden menjawab sangat

penting dan hanya 4,1% yang menyatakan tidak penting. Demikian pula di Kabupaten Bolaang Mongondow yang mayoritas penduduknya adalah muslim, sebanyak 62,0% responden menyatakan sangat penting bupati beragama Islam dan hanya 10,5% responden yang menyatakan tidak penting.<sup>10</sup> Data ini menunjukkan bahwa agama diyakini menjadi faktor sosiologis penting dalam pilihan politik. Mayoritas pemilih di Indonesia masih menganggap penting latar belakang agama kandidat kepala daerah dan menolak jika dipimpin oleh orang yang berbeda agama.

Agama dalam hal ini dipahami bukan sekedar soal identitas, religiusitas dan intensitas keyakinan, tetapi juga berperan dalam sosialisasi politik. Terutama ketika individu terlibat dalam kelompok berbasis agama. Pada masyarakat yang religius, aktivitas politik masyarakat salah satunya dapat diamati pada konektivitasnya dengan aktivitas sosial keagamaan. Aktivitas ini menjadikan agama sebagai salah satu faktor penting dalam membentuk perilaku memilih dan pilihan politik.

### ***Faktor Agama dalam Perilaku Pemilih***

Lijphart menemukan bahwa faktor agama, dibandingkan dengan faktor bahasa atau kelas, lebih memainkan peran yang lebih penting dalam membentuk pilihan suara partai di Belgia, Kanada, Afrika Selatan, dan Swiss.<sup>11</sup> Di Amerika Serikat, misalnya, tradisionalisme agama di kalangan pemilih juga menjadi penting.<sup>12</sup> Bahkan dalam pemilihan presiden 2016, sentimen keagamaan juga diyakini membentuk sikap dan orientasi pilihan terhadap presiden di Amerika.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Lingkaran Survei Indonesia, "Faktor Agama Dalam Pilkada", Kajian Bulanan LSI, Edisi 10, Februari 2008.

<sup>11</sup> Arend Lijphart Arend. "Religious vs. Linguistic vs. Class Voting: The "Crucial Experiment" of Comparing Belgium, Canada, South Africa, and Switzerland", dalam *The American Political Science Review*, vol.73, no.2, (1979).

<sup>12</sup> Geoffrey C. Layman. "Religion and political behavior in the United States: The impact of beliefs, affiliations, and commitment from 1980 to 1994", *The Public Opinion Quarterly*, vol. 61, no.2, (Summer 1997).

<sup>13</sup> Corwin E. Smidt, Kevin den Dulk, Brian Froehle, James Penning, Stephen Monsma, dan Douglas Koopman. *The Disappearing God Gap?: Religion in the 2008 Presidential Election*. (New York: Oxford University Press. 2010); Corwin E. Smidt. "The Role of Religion in the 2016 American Presidential Election", *Journal for Religion, Society and*

<sup>8</sup> Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. "Voting Behavior in Indonesia since Democratization", dalam *Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

<sup>9</sup> Centre for Strategic and International Studies (CSIS), "3 Tahun Jokowi: Kenaikan Elektoral & Kepuasan Publik", September 2017. [https://www.csis.or.id/uploaded\\_file/event/pemaparan\\_hasil\\_survei\\_opini\\_publik\\_tiga\\_tahun\\_pemerintahan\\_joko\\_widodo\\_\\_\\_jususuf\\_kalla\\_kinerja\\_pemerintahan\\_dan\\_peta\\_politik\\_nasional\\_\\_notulen.pdf](https://www.csis.or.id/uploaded_file/event/pemaparan_hasil_survei_opini_publik_tiga_tahun_pemerintahan_joko_widodo___jususuf_kalla_kinerja_pemerintahan_dan_peta_politik_nasional__notulen.pdf), diakses pada 09 Agustus 2018.

Di Indonesia, terjadi perdebatan soal keterkaitan orientasi keagamaan dengan preferensi politik. Sebagian sarjana politik meyakini bahwa orientasi keagamaan merupakan basis analisa untuk memahami politik Indonesia. Namun sebagian sarjana politik yang lain menolak hal tersebut.

Beberapa sarjana yang meyakini peran agama dalam perilaku memilih adalah Anies Baswedan dan Dwight Y. King.<sup>14</sup> Konsep yang digunakan sebagai dasar analisis tersebut adalah politik aliran, yang dikembangkan oleh Greetz.<sup>15</sup> Sejak pemilu 1955, sebagian besar sarjana politik berpendapat bahwa orientasi keagamaan atau politik aliran menjadi penentu utama perilaku memilih dan pilihan partai di Indonesia.<sup>16</sup> Cara pandang pada pemilu 1955 juga digunakan dalam melihat kuatnya partai-partai besar pada pemilu 1999 dan 2004. Selain itu, politik aliran dianggap mempunyai pengaruh dalam pilihan partai.<sup>17</sup>

---

*Politics*, vol. 1, issue 1, (2017); Andrew L. Whitehead, Samuel L. Perry, dan Joseph O. Baker. "Make America Christian Again: Christian Nationalism and Voting for Donald Trump in the 2016 Presidential Election", *Sociology of Religion*, vol. 79, issue 2, (2018).

<sup>14</sup> Lihat Dwight Y. King, *Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*, (Westport, CT: Praeger, 2003); Anies Rasyid Baswedan, "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory", dalam *Asian Survey*, vol. 44, no. 4, (2004); Andreas Ufen, "From Aliran to Dealignment: Political Parties in Post-Suharto Indonesia", *South East Asia Research*, vol. 16, issue 1, (2008).

<sup>15</sup> Geertz melakukan diferensiasi antara abangan (kelompok sinkretis yang menekankan kepercayaan animistik), santri (kelompok yang merupakan pengikut Islam) dan priyayi (kelompok yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya aristokrat). Pada 1950-an di Jawa, keempat varian ini menemukan ekspresi politik dalam aliran. Lihat Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (Chicago: University of Chicago Press, 1960).

<sup>16</sup> Lihat misalnya Harold A. Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, (New York: Cornell University Press, 1978); Daniel S. Lev, "Political Parties in Indonesia", *Journal of Southeast Asian History*, vol. 8, no. 1, (1967); Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999); R. William Liddle, *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study*, (New Haven dan London: Yale University Press, 1970); Bactiar Effendy, *Islam and State in Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2003); Donald K. Emmerson, *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*, (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1976).

<sup>17</sup> Anies Rasyid Baswedan, "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory", *Asian Survey*, vol. 44, no. 4, (2004); Dwight Y. King, *Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*, (Westport, CT: Praeger, 2003).

Argumentasi ini didukung dengan kondisi partai politik di Indonesia, sebagai negara demokrasi baru, yang saat itu belum terinstitusionalisasi dan memainkan peran penting dalam membentuk kesetiaan pemilih dan identifikasi kepartaian. Orientasi dan pilihan politik diyakini dibentuk oleh orientasi religius.

Meski studi Geertz memiliki dampak yang kuat dalam memahami perilaku memilih di Indonesia – khususnya di Jawa, diferensiasi aliran ini juga memperoleh beragam kritik. Suparlan misalnya, mengkritik konsep santri, priyayi dan abangan tidak mendeskripsikan fenomena yang sama, seperti orientasi keagamaan. Santri dan abangan dapat dibandingkan sebagai kategori keagamaan. Tetapi priyayi, lebih tepat disebut dengan kategori kelas atau status sosial, aristokrasi khas masyarakat Jawa tradisional.<sup>18</sup>

Beberapa sarjana politik menolak asumsi bahwa preferensi politik berkaitan erat dengan orientasi keagamaan. Pendekatan politik aliran juga dianggap tak relevan. Sarjana politik yang meyakini hal ini misalnya Saiful Mujani dan William Liddle.<sup>19</sup> Sejak pemilu 1999 terdapat bukti kuat bahwa faktor penentu paling penting dari perilaku memilih di Indonesia adalah pada faktor-faktor psikologis dan ekonomi politik (pilihan rasional).<sup>20</sup> Pemilih Indonesia dinilai sudah mulai rasional. Pemilih cenderung memilih kandidat yang dianggap mempunyai kapasitas dalam aspek pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, mempertahankan persatuan nasional, memerangi korupsi, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan persatuan nasional.

Bukti lain yang sama juga dapat dilihat pada survei yang dilakukan oleh Sharma dkk, dimana terdapat penurunan pengaruh agama terhadap pilihan politik pemilih di Indonesia. Pada 2010, lebih dari setengah orang Indonesia (62%) mengatakan bahwa agama memiliki pengaruh penting dalam pilihan politik. Angka tersebut

---

<sup>18</sup> Parsudi Suparlan, Pengantar dalam Clifford Geertz, (ed.) *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1982).

<sup>19</sup> Saiful Mujani dan R. William Liddle, "Indonesia: Personalities, Parties, and Voters", *Journal of Democracy*, vol. 21, no. 2, (April 2010).

<sup>20</sup> Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat*, (Jakarta: Mizan, 2012).

turun dibanding tahun 2008 yang mencapai angka 79%.<sup>21</sup>

Liddle menjelaskan bahwa kelompok abangan dan priyayi telah mengalami stagnasi yang disebabkan oleh mengerucutnya ideologi nasionalis dan sekuler.<sup>22</sup> Banyak pihak yang menyadari kekurangan politik aliran sebagai basis analisis, terutama disebabkan oleh kaburnya batasan antara manifestasi politik Islam yang tidak begitu saja bisa direduksi menjadi pembilahan abangan, santri dan priyayi.<sup>23</sup>

Meski demikian, Liddle sebenarnya juga tidak menolak sepenuhnya anggapan bahwa orientasi keagamaan relevan dengan preferensi pilihan politik. Lebih lanjut, Liddle juga menilai bahwa politik aliran – dan orientasi keagamaan – barangkali lebih cocok dikaji pada ranah politik lokal.<sup>24</sup> Konservatisme dan fragmentasi berdasarkan keagamaan juga dianggap masih tampak di level lokal.<sup>25</sup> Argumentasi ini menguatkan cara pandang terhadap partikularitas politik lokal, termasuk soal identitas, agama, politik aliran dan perilaku memilih di level lokal.<sup>26</sup> Hal ini dapat diamati ketika agama juga

menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilu (*marketing politik*) di level lokal.

### **Marketing Politik dan Pilkada: Konten dan Konteks**

*Marketing* sebagai sebuah terminologi dalam ilmu politik meminjam teori dari disiplin ilmu lain, khususnya ilmu ekonomi.<sup>27</sup> *American Marketing Association* mendefinisikan *marketing* sebagai “kegiatan, serangkaian lembaga, dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai (keuntungan) bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya”.<sup>28</sup> Sedangkan *marketing politik* dapat didefinisikan sebagai proses analisis, perencanaan, implementasi, dan pemilihan, yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara hubungan pertukaran yang saling menguntungkan antara para kontestan pemilu dengan pemilih, untuk mencapai tujuan politik tertentu.<sup>29</sup>

*Marketing politik* mengadopsi teknik-teknik yang digunakan dalam *marketing* komersial seperti intelijen pasar (*survei*, *focus group*, konsultasi warga, dan lain-lain), *positioning* atau penentuan target pasar, serta komunikasi pemasaran (*advertising*, strategi penginformasian untuk mengajak, membujuk dan mengingatkan konsumen/pemilih). Penggunaan teknik ini membantu para kontestan menentukan preferensi pemilih, dan membantu dalam membuat strategi *marketing* untuk tujuan politik tertentu.<sup>30</sup> Jika

(Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2003).

<sup>27</sup> Stephan C. Henneberg dan Nicholas J. O’shaughnessy, “Theory and Concept Development in Political Marketing” dalam *Journal of Political Marketing*, vol. 6, issue 2-3, (2007).

<sup>28</sup> The American Marketing Association. *The American Marketing Association Releases New Definition for Marketing*. 2008. <https://archive.ama.org/archive/aboutama/documents/american%20marketing%20association%20releases%20new%20definition%20for%20marketing.pdf>, diakses pada 09 September 2018.

<sup>29</sup> Aron O’Cass, “The External-Internal Orientation of Political Party: Social Implications Of Political Party Marketing Orientation”, *Journal of Public Affair*, vol. 1, no. 2, (2001): 136-152.

<sup>30</sup> Jennifer Lees-Marshment, *Introduction. In Political Marketing: Principles and Applications*, (London and New York: Routledge. 2009).

<sup>21</sup> Rakesh Sharma, Lauren Serpe, dan Astri Suryandari, *Indonesia Electoral Survey 2010 November 2010*, (Washington, D.C.: IFES for the Australian Agency for International Development (USAID), 2010).

<sup>22</sup> R. William Liddle, “New Patterns of Islamic Politics in Democratic Indonesia”, *Asia Program*, no. 110, Washington, D.C: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2003.

<sup>23</sup> M. Faishal Aminuddin, dan Moh. Fajar Shodiq Ramadlan, “Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009”, *Jurnal Politik*, vol. 1, no. 1, (2015).

<sup>24</sup> R. William Liddle, “Memperbaiki Mutu Demokrasi: Sumbangan Ilmu Politik” dalam Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean (eds.), *Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan*, (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2012).

<sup>25</sup> Najib Burhani, “Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan”, *Jurnal Maarif*, vol. 11, no. 2, (Desember 2016).

<sup>26</sup> Lihat H. S. Nordholt, “Desentralisasi di Indonesia: Peran Negara Kurang Lebih Demokratis?” dalam John Harris, Kristian Stokke dan Olle Tornquist (eds.), *Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru*, (Jakarta: Demos, 2005); E. Erman, “Indikasi Patrimonialisme dan Klientalisme dalam Proses Pilkada”, dalam Syarif Hidayat dan Hari Susanto (eds.), *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasca Pilkada*. (Jakarta: LIPI Press, 2007); Edward Aspinall dan Greg Fealy (eds), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*,

teknik dalam marketing komersial digunakan untuk pangsa pasar ekonomi, maka pangsa pasar dalam *marketing* politik adalah pemilih yang memberi suara kepada partai politik atau kandidat melalui pemilu.

Teknik menentukan pangsa pasar inilah yang kemudian berkenaan dengan identifikasi perilaku pemilih. Pemetaan perilaku memilih menyediakan pengetahuan dan informasi yang memungkinkan kontestan (baik kandidat, partai maupun tim sukses) menggunakan alat dan strategi *marketing* untuk memperoleh dukungan.<sup>31</sup> Pemetaan terhadap perilaku memilih kemudian menjadi salah satu input dalam menentukan strategi dalam *marketing* politik. Perilaku pemilih yang diharapkan adalah dukungan elektoral, khususnya adalah pada pemberian suara dalam pemilu.

Dalam konteks pilkada, *marketing* politik disesuaikan dengan konteks lokal. *Marketing* politik lokal dapat didefinisikan sebagai strategi yang terkait dengan pemasaran, kegiatan, dan taktik yang dilaksanakan oleh partai politik atau kontestan dalam lingkup geografis lokal, untuk memaksimalkan dukungan elektoral di daerah pemilihan tertentu. Dalam hal ini, *marketing* politik lokal juga berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya partikular atau spesifik, seperti identitas, bahasa/pesan, nilai, gambar, simbol, alat atau media komunikasi, manajemen *marketing* dan penentuan target.<sup>32</sup>

Strategi yang spesifik dalam konteks lokal ini yang dapat disebut sebagai *micro-targeting*, yakni strategi yang menasar pada kelompok tertentu. Dalam *marketing* politik, teknik ini berupaya memobilisasi pemilih dengan pertimbangan dan basis data demografis, geografis, aspek sosial-ekonomi dan informasi lain terkait pemilih.<sup>33</sup> Teknik ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek

spesifik, seperti pangsa pasar atau segmen pemilih yang menjadi target. Lokalitas menjadi penting karena satu daerah dengan daerah lain dapat memiliki konteks sosial, politik, ekonomi dan sejarah yang berbeda. Perbedaan ini menjadi pertimbangan dalam merumuskan strategi pemilu yang lebih spesifik, khususnya dalam merumuskan isu-isu dan program-program yang bersifat spesifik dan khas daerah.

Baines dan Lynch menguraikan aspek-aspek spesifik tersebut dalam tiga hal yang saling berkait, yakni: konteks, konten dan proses.<sup>34</sup> *Pertama*, adalah konteks, berkenaan dengan keadaan. Kondisi atau situasi di sekitar aktivitas perumusan strategi. Konteks *marketing* politik bersifat khusus karena secara substansial berbeda di setiap negara, atau daerah (provinsi, kabupaten/kota). Konteks juga berkenaan dengan latar belakang lingkungan, yang kemudian juga menjadi kerangka dalam menyusun strategi *marketing*. Latar belakang ini terbentuk dari sejarah, budaya, sistem pemerintahan, birokrasi, sistem dan regulasi pemilu, derajat kompetisi, dan konteks umum lain yang berkaitan dengan kegiatan politik. Hal ini menjadi penting karena mempengaruhi pilihan strategi dalam *marketing* politik.

*Kedua* adalah konten. Konten berkenaan dengan pesan dan isu dalam strategi kampanye. Menurut Baines dan Lynch, konten politik berbeda di masing-masing negara atau daerah. Masing-masing kontestan melihat persoalan di sekitar pemilu di tempat yang berbeda dengan cara yang juga berbeda. Karena itu konten dalam strategi *marketing* politik dapat berbeda-beda. Baines dan Lynch juga memberi catatan bahwa konten dalam strategi kampanye juga dapat menggunakan unsur-unsur negatif dalam kampanye, misalnya kampanye hitam/*black campaign* yang secara sederhana merupakan bagian dari kampanye negatif untuk menyerang lawan, tetapi tidak berdasarkan fakta sehingga dapat menjurus pada fitnah atau hujatan.

*Ketiga* adalah proses, yakni serangkaian strategi yang dikembangkan selama masa kampanye dan proses manajerial yang melibatkan

<sup>31</sup> Aron O’Cass dan Anthony Pecotich, “The Dynamics of Voter Behavior and Influence Processes in Electoral Markets: A Consumer Behavior Perspective”, *Journal of Business Research*, vol. 58, ), (April 2005).

<sup>32</sup> Peeter Reeves. “Local Political Marketing in the Context of the Conservative Party”, *Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing*, vol. 25, 2, (2003): 127–163.

<sup>33</sup> Costas Panagopoulos dan Peter L. Francia, “Grassroots Mobilization in the 2008 Presidential Election”, *Journal of Political Marketing*, vol. 8, 4, (2009): 315–333.

<sup>34</sup> Paul Baines dan Richard Lynch, “The Context, Content and Process of Political Marketing Strategy”, *Journal of Political Marketing*, vol. 4, 2-3, (Oktober 2005): 1-18.

konteks dan konten. Berbeda halnya dengan kampanye peluncuran produk (berupa barang dan jasa), kampanye politik memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih besar daripada kampanye peluncuran produk. Fleksibilitas ini berkaitan dengan kondisi-kondisi yang dinamis di sekitar kegiatan *marketing* atau kampanye politik. Soal isu atau konten kampanye misalnya, bisa berubah disesuaikan dengan tempat, waktu dan audiens. Atau, konten dalam *marketing* politik juga berubah guna merespon peristiwa atau isu tertentu dalam kontestasi pemilu.

Berkenaan dengan *marketing* politik di level lokal, salah satu hal yang dapat diamati dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia adalah berkenaan dengan konteks dan konten yang spesifik, misalnya identitas, seperti etnisitas, agama dan isu putra asli daerah. Dalam pendekatan sosiologis, salah satu dimensi dalam membentuk perilaku memilih atau preferensi politik adalah soal identitas. Dalam konteks inilah agama menjadi dimensi dan instrumen yang dapat digunakan dalam memperoleh dukungan.

Alasan paling utama bagi politisi atau kontestan politik memanfaatkan agama sebagai instrumen politik, adalah karena agama menyajikan platform strategis untuk membangun kesan dan citra positif. Instrumentasi agama menciptakan kesan religius, citra yang bermoral, dan dapat dipercaya. Dengan memanfaatkan jargon agama dan menghadiri pertemuan-pertemuan agama, kontestan pemilu meminta kepada kelompok-kelompok agama untuk memberi dukungan, berdasarkan asumsi bahwa kontestan tersebut adalah bagian dari kelompok agama tersebut.<sup>35</sup>

Dalam konteks tersebut, isu agama merupakan produk yang ditawarkan dalam kampanye atau *marketing* politik. Selain sebagai alat memperoleh dukungan, isu agama juga dapat menjadi alat untuk melemahkan dukungan bagi lawan. Dalam penjelasan Baines dan Lynch, hal itu memungkinkan dilakukan dengan memproduksi isu-isu identitas dan kampanye hitam. Isu agama, sebagai konten, berkelindan dengan konteks tempat dan waktu dimana

pilkada dan proses kegiatan *marketing* politik berlangsung.

### **Konten: Isu Agama pada Pilkada 2015, 2017 dan 2018**

Sepanjang penyelenggaraan pilkada serentak 2015-2018 di 541 daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, isu agama ditemukan di 7 pilkada. Berikut ini penjelasan soal isu agama atau pesan (konten) apa saja yang muncul selama penyelenggara pilkada 2015-2018.

#### ***Pilkada 2015***

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada, terdapat tiga daerah dimana isu agama mengemuka pada penyelenggaraan pilkada serentak 2015, yakni Pilgub Sulawesi Utara (Sulut), Pilwali Kota Depok dan Pilwali Kota Surakarta.

Pada Pilgub Sulawesi Utara (Sulut) terdapat kejadian dimana sekelompok orang berjubah putih menyebarkan selebaran berisi himbuan kepada warga muslim untuk tidak memilih kandidat yang berbeda agama. Kandidat yang menjadi sasaran adalah pasangan Olly Dondokambey-Steven Kandouw yang merupakan pemeluk agama Kristen Protestan dan diusung oleh PDIP.<sup>36</sup> Isi himbuan menyebutkan agar tidak memilih pasangan calon Olly-Kandouw karena akan mendiskreditkan kelompok minoritas muslim di Sulut apabila menang. Pilgub Sulut dimenangkan oleh pasangan Olly-Kandouw dengan perolehan 674.252 suara atau 51,41 persen.<sup>37</sup>

Sedangkan pada pilwali Kota Depok tahun 2015, isu agama yang muncul berkenaan dengan sentimen Islam dan Kristen, terutama terkait dengan pembangunan gereja. Isu ini disematkan kepada pasangan Dimas Oky-Babai Suhaimini yang diusung oleh PDIP, PAN, PKB dan Nasdem. Terdapat spanduk-spanduk yang memuat pernyataan bahwa Dimas-Babai akan

<sup>36</sup> Beritasatu.com. "Isu SARA Diduga Kotori Pilgub Sulawesi Utara," <http://www.beritasatu.com/nasional/326205-isu-sara-diduga-kotori-pilgub-sulawesi-utara.html>, diakses pada 07 Agustus 2018.

<sup>37</sup> KPU Sulawesi Utara, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

<sup>35</sup> Jaco Beyers, "Religion as Political Instrument: The case of Japan and South Africa", *Journal for the Study of Religion*, vol. 28, no. 1, (2015): 142-164.

**Tabel 2.** Pilkada Serentak Tahun 2015 yang Diwarnai Isu Agama

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Isu Agama yang muncul	Kandidat dan Partai Pengusung
1.	Pilgub Sulawesi Utara	Ajakan kepada umat agama tertentu untuk tidak memilih kandidat yang berbeda agama.	1. Olly Dondokambey-Steven Kandouw (PDIP) 2. Maya Rumantir-Glenny Kairupan (Partai Gerindra dan Partai Demokrat); 3. Benny Mamoto dan David Bobihoe (Partai Golkar, PKS dan PKPI)
2.	Pilwali Kota Depok	Isu agama lewat spanduk-spanduk yang memuat pernyataan bahwa Dimas-Babai akan mewujudkan program "satu kelurahan satu gereja".	1. Dimas Oky-Babai Suhaimini, diusung oleh PDI-P, PAN, PKB, dan Nasdem 2. Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna, diusung oleh PKS, Gerindra.
3.	Pilwali Kota Surakarta (Solo)	Adanya spanduk dan selebaran yang berisi ajakan untuk tidak memilih pemimpin non-muslim atau ajakan memilih pemimpin yang seagama.	1. Anung Indro Susanto-Muhammad Fajri. Diusung oleh PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat 2. F.X. Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo, diusung oleh PDI-P

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber

mewujudkan program “satu kelurahan satu gereja”.<sup>38</sup> Tidak jelas spanduk ini dipasang oleh kelompok siapa. Pilwali Depok dimenangkan oleh pasangan Idrus-Pradi dengan perolehan suara sebanyak 411.367 atau 61,91 persen dari total suara sah.<sup>39</sup> Pada Pilwali Kota Surakarta, isu agama cukup kencang dikarenakan salah satu calon petahana FX Hadi Rudyatmo beragama Katolik dan mayoritas warga Solo memeluk agama Islam. Isu agama dimunculkan dalam bentuk spanduk dan selebaran yang berisi ajakan untuk tidak memilih pemimpin non-muslim atau ajakan memilih pemimpin yang seagama. Spanduk yang tersebar diantaranya “Merindukan Wali Kota Muslim”, “Jangan Sampai Solo Dipimpin Orang Kafir”.<sup>40</sup> Pasangan FX Hady-

<sup>38</sup> Kompas.com. “Pilkada Depok, Dimas-Babai Diserang Isu SARA Lewat Spanduk,” 10 September 2015, <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/10/12373471/Pilkada.Depok.Dimas-Babai.Diserang.Isu.SARA.lewat.Spanduk>, diakses pada 07 Agustus 2018.

<sup>39</sup> KPU Kota Depok, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2015.

<sup>40</sup> Kompas.com. “Akhimya, FX Rudy Komentari Isu SARA yang Sempat Menerpanya,” 10 Desember 2015, <https://regional.kompas.com/read/2015/12/10/12421661/Akhirnya.FX.Rudy.Komentari.Isu.SARA.yang.Sempat.Menerpanya>,

Purnomo memenangkan Pilwali Surakarta dengan perolehan 169.902 suara atau 60,39%.<sup>41</sup>

### ***Pilkada 2017***

Pada pilkada Serentak 2017, di 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, terdapat satu pilkada dimana isu agama mengemuka, yakni Pilgub DKI Jakarta. Pilgub DKI Jakarta merupakan pilkada yang diwarnai isu agama dan menciptakan fragmentasi yang cukup jelas antar pendukung. Isu agama di Pilgub DKI Jakarta terjadi dipicu dugaan penistaan agama oleh petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bermula saat Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Saat berpidato di hadapan warga, Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan itu disertai kutipan surah Al Maidah ayat 51 yang menuai reaksi dari kelompok Islam. Pernyataan yang beredar melalui tayangan video pidato Ahok kemudian

diakses pada 07 Agustus 2018.

<sup>41</sup> KPU Kota Surakarta, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2015.

Tabel 3. Pilkada Serentak Tahun 2017 yang Diwarnai Isu Agama

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Isu agama yang muncul	Kandidat dan Partai Pengusung
1.	Pilgub DKI Jakarta	Muncul larangan dengan berbagai media untuk memilih pemimpin kafir, larangan memilih pemimpin penista agama, dan disertai kecaman, seperti tidak akan dishalat jenazahnya. Mobilisasi sentiment agama juga disampaikan dalam bentuk aksi “bela Islam” di Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvia Murni, didukung oleh Demokrat, PAN, PKB, dan PPP</li> <li>2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, diusung oleh PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura;</li> <li>3. Anies Basewon-Sandiaga Uno, diusung oleh PKS, dan Gerindra</li> </ol>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

menjadi viral di media sosial. Kasus ini berlanjut ketika Ahok mencalonkan diri sebagai gubernur DKI bersama Djarot Saiful Hidayat dan diusung oleh PDIP, Golkar, Nasdem dan Hanura.

Isu agama dalam Pilgub DKI Jakarta berlangsung seperti larangan memilih pemimpin kafir, larangan memilih pemimpin penista agama, dan ancaman bagi warga muslim yang mendukung dan memilih Ahok tidak akan dishalat jenazahnya.<sup>42</sup> Sentimen dan isu agama juga menguat dengan disampaikan dalam bentuk aksi “bela Islam” di Jakarta, yang dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada 17 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember 2016. Aksi tersebut tidak lepas dari konteks Pilgub DKI Jakarta 2017.

Dampak dari adanya isu agama pada pilkada DKI Jakarta ini diyakini menjadi salah satu penyebab kekalahan petahana. Sebab, meski survei kepuasan terhadap kinerja Ahok-Djarot cukup tinggi, di mana 67% mengaku puas, dan 29% yang mengaku tidak puas<sup>43</sup>, namun tidak berkolerasi lurus dengan tingkat elektabilitas Ahok-Djarot. Pilkada dimenangkan oleh pasangan Anies-Sandi

melalui dua putaran dengan perolehan akhir Ahok-Djarot memperoleh 2.351.242 suara atau 42.05%, sedangkan Anies-Sandiaga memperoleh 3.240.332 suara atau 57.95%.<sup>44</sup>

### *Pilkada 2018*

Pasca pilkada 2017, kekhawatiran menguatnya isu-isu agama dan memunculkan polarisasi di masyarakat menguat – antara kelompok Islam di satu sisi dan nasionalis di sisi yang lain – yang dinilai sebagai akibat dinamika pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017. Meski pun, kekhawatiran tersebut ternyata tidak banyak terbukti mengingat hanya beberapa daerah saja dimana isu-isu agama dalam pilkada mengemuka. Selain itu, pilkada juga tidak mencerminkan aliansi politik di level nasional. Sebagian besar koalisi yang terbangun dalam mendukung kandidat tidak mewakili aliansi politik yang sama. Aliansi politik di level lokal sangat fleksibel dan memperlihatkan bahwa tidak ada musuh politik yang pasti. Di tingkat nasional, Gerindra dan PKS adalah partai oposisi, tetapi di Jawa Timur, mereka justru berada dalam satu koalisi dengan PDIP.

<sup>42</sup> Cnnindonesia.com. “Perang Spanduk SARA Jelang Pemungutan Suara,” 6 April 2017, <https://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki/20170406081402-516-205324/perang-spanduk-sara-jelang-pemungutan-suara/>, diakses pada 09 Agustus 2018.

<sup>43</sup> Kompas.com. “Survei CSIS: Waga DKI Menyukai Kepribadian Ahok, Setelah Itu Prestasinya,” 25 Januari 2016, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/01/25/13105041/Survei.CSIS.Warga.DKI.Menyukai.Kepribadian.Ahok.Setelah.Itu.Prestasinya>, diakses pada 09 Agustus 2018.

<sup>44</sup> KPU RI. Lihat di [https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/dki\\_jakarta](https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/dki_jakarta), diakses pada 08 Agustus 2018.

Tabel 6. Pilkada Serentak Tahun 2018 yang Diwarnai Isu Agama

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Isu agama yang muncul	Kandidat dan Partai Pengusung
1.	Pilgub Sumatera Utara	Muncul himbauan yang dikeluarkan oleh KUI yang meminta kepada warga Sumut agar memilih pasangan muslim-muslim.	1. Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, (Gerindra, PKS, PAN, Nasdem, Golkar, Hanura, dan Demokrat); 2. Djarot-Sihar Sitorus (PDI-P dan PPP).
2.	Pilgub Jawa Barat	1. Ridwan Kamil dianggap tidak merepresentasikan sebagai pemimpin yang berasal dari muslim karena pro LGBT; 2. Dedy Mulyadi dianggap bertentangan dengan Islam karena selama menjadi bupati Purwakarta banyak membangun patung. Muncul anjuran tidak memilih duet dua Dedy.	1. Ridwan Kamil – UU Ruzhanul Ulum (Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura); 2. Tubagus Hasanuddin- Anton Charliyan (PDI-P) 3. Sudrajat-Ahmad Syaikh (PKS, Gerindra, dan PAN); 4. Dedy Mizwar – Dedi Mulyadi (Demokrat dan Golkar).
3.	Pilwali Kota Bekasi	Beredar surat perjanjian antara Rahmad Effendi (Calon Incumbent) dengan pastor-pastor bahwa menjanjikan pendirian 500 gereja, asalkan dia didukung dalam ajang pilkada oleh kalangan Nasrani.	1. Rahmad Effendi – Tri Adhianto, (Golkar, PAN, Demokrat, PPP, Hanura, PKB, PDI-P); 2. Nur Supriyanto-Adhy Firdaus Saady (PKS dan Gerindra)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pada Pilgub Sumut, terdapat beberapa aktivitas yang menggunakan isu agama. Pertama, diselenggarakannya Kongres Umat Islam (KUI) di Medan pada 31 Maret hingga April 2018. Hasil kongres tersebut termaktub dalam Piagam Umat Islam Sumatera Utara yang salah satu hasilnya meminta kepada warga Sumut agar memilih pasangan muslim-muslim.<sup>45</sup> Meskipun dukungan tersebut tidak ditujukan langsung terhadap pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (diusung oleh Gerindra, PKS, PAN, Nasdem, Golkar, Hanura, Demokrat dan PKB), namun ini pasangan muslim-muslim berada pada pasangan ini. Kedua, diselenggarakannya Gerakan Shalat Subuh Berjamaah pada 27 Juni

<sup>45</sup> Tirto.id. "Faktor yang Membuat Djarot Kalah dari Edy di Pilgub Sumut 2018," <https://tirto.id/faktor-yang-membuat-djarot-kalah-dari-edy-di-pilgub-sumut-2018-cM7n>, diakses pada 09 Agustus 2018.

2018, sehari sebelum pemungutan suara. Acara tersebut dihadiri oleh Edy Sudrajat.<sup>46</sup> Pilgub Sumut dimenangkan oleh pasangan Edy-Musa dengan 3.291.137 suara atau 57,58%.<sup>47</sup>

Pada Pilgub Jabar, isu agama mengarah pada pasangan Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum (Diusung Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura) dan Dedy Mizwar-Dedi Mulyadi (diusung oleh Demokrat dan Golkar). Ridwan Kamil dianggap tidak merepresentasikan sebagai pemimpin yang berasal dari muslim karena pro LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), meski pada

<sup>46</sup> Detik.com. "Gerakan Subuh Berjamaah: Strategi Menangkan Cagub Edy Rahmayadi," <https://news.detik.com/berita/d-4062265/gerakan-subuh-berjamaah-strategi-menangkan-cagub-edy-rahmayadi-pada-09-agustus-2018>.

<sup>47</sup> KPU Sumatera Utara, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

akhirnya oleh Ridwan Kamil diklarifikasi kembali. Dari sini muncul kampanye jangan memilih Ridwan Kamil.<sup>48</sup> Isu agama juga disematkan kepada pasangan Dedy Mizwar-Dedi Mulyadi. Muncul anjuran tidak memilih duet dua Dedy di Pilgub Jabar karena Dedi Mulyadi dinilai penganut penghayat kepercayaan lokal.<sup>49</sup> Pilgub Jabar dimenangkan oleh pasangan Ridwan-Ruzhanul dengan 7.226.254 suara atau 32,88% suara sah.<sup>50</sup>

Isu agama dalam Pilwali Kota Bekasi diwarnai dengan beredarnya surat perjanjian antara Rahmad Effendi (calon petahana) dengan beberapa pastor tentang pendirian 500 gereja, asal didukung dalam pilkada. Surat perjanjian palsu ini beredar di media sosial dan tidak jelas siapa yang membuat.<sup>51</sup> Rahmad Effendi berpasangan dengan Tri Adhianto dan diusung oleh Golkar, PAN, Demokrat, PPP, Hanura, PKB, PDI-P. Sedangkan lawannya adalah Nur Supriyanto-Adhy Firdaus Saady yang diusung oleh PKS dan Gerindra. Pilwali Kota Bekasi dimenangkan oleh Rahmad-Adhianto dengan 697.634 suara.<sup>52</sup>

Jika dilihat pada pilkada 2015-2018, konten isu agama dapat diklasifikasikan dalam dua jenis konten: Pertama, ajakan untuk tidak memilih kepala daerah yang beda agama (atau ajakan untuk memilih kepala daerah yang seagama). Hal ini dapat dilihat di pilkada Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kota Surakarta dan DKI Jakarta.

Kedua, kampanye hitam (*black campaign*) berupa rekayasa fakta dan pemberian informasi

<sup>48</sup> Liputan.6.com. "Ridwan Kamil: Isu Dukungan Kaum LGBT Bentuk Kampanye Hitam," <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3299863/ridwan-kamil-isu-dukungan-kaum-lgbt-bentuk-kampanye-hitam>, diakses pada 07 Agustus 2018.

<sup>49</sup> Jppn.com. "Sosok Dedy Mulyadi dan Isu Agama di Pilgub Jabar," <https://www.jpnn.com/news/sosok-dedy-mulyadi-dan-isu-agama-di-pilgub-jabar>, diakses pada 07 Agustus 2018.

<sup>50</sup> KPU RI, <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/report/penetapan/list/nasional>, diakses pada 09 Agustus 2018.

<sup>51</sup> Cnnindonesia.com. "PGI: Surat Perjanjian Wali Kota Bekasi Dengan Gereja Palsu," 25 Juni 2015, <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180625121702-32-308811/pgi-surat-perjanjian-wali-kota-bekasi-dengan-gereja-palsu?>, diakses pada 07 Agustus 2018.

<sup>52</sup> Kompas.com. "Hasil Rekapitulasi KPU Bekasi: Pepen-Tri Menang dari Nur-Adhy," 6 Juli 2018, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/06/18525211/hasil-rekapitulasi-kpu-bekasi-pepen-tri-menang-dari-nur-adhy>, diakses pada 07 Agustus 2018.

yang belum jelas kebenarannya. Bentuknya beragam, seperti hubungan terhadap kelompok LGBT, dukungan pembangunan gereja (Dimas Oky dalam Pilkada Kota Depok), dan Dedy Muluadi (Pilkada Jawa Barat) yang dianggap bertentangan dengan Islam karena selama menjadi bupati Purwakarta banyak membangun patung.

### **Konteks: Isu Agama dalam Pilkada**

Penjelasan soal bagaimana isu agama (konten) muncul tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkenaan dengan konteks yang berkembang di daerah penyelenggara pilkada. Setidaknya ada dua konteks, yakni konteks sosial-politik di level lokal dan kompetitor dalam pilkada.

### ***Konteks Sosial-Politik di Level Lokal: Sentimen Agama dan Pengalaman Konflik Agama***

Konteks pertama adalah konteks sosial-politik di level lokal. Konteks ini salah satunya dapat berkaitan dengan pengalaman atau sejarah konflik keagamaan di masa lalu. Konteks ini menjadi salah satu sumber produksi isu agama dalam pilkada.<sup>53</sup> Sebagaimana terjadi pada Pilgub Sulut. Jika dilihat dari konteks historis, Sulut pernah mengalami konflik berbau agama, yakni penyerangan oleh sekelompok massa terhadap pembangunan masjid di Kota Bitung, Sulawesi Utara pada November 2015. Penyerangan terjadi karena pembangunan masjid dianggap belum mendapatkan IMB.<sup>54</sup> Meski tidak berkaitan langsung, tetapi isu ini menjadi perhatian bagi warga muslim di Sulut. Situasi tersebut digunakan untuk membentuk isu agama dalam pilgub. Dari identifikasi yang dilakukan, isu agama digunakan untuk menciptakan kekhawatiran kelompok minoritas muslim jika dipimpin oleh kepala daerah berlatarbelakang Kristen.

<sup>53</sup> Meskipun dalam beberapa kasus ada daerah yang mengalami konflik keagamaan masa lalu namun tidak terdapat isu agama dalam pelaksanaan pilkada, seperti di Kota Ambon Provinsi Maluku.

<sup>54</sup> Republika.co.id. "Penolakan Masjid di Bitung Perkeruh Konflik Rumah Ibadah," 11 November 2015, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/11/nxmrie365-penolakan-masjid-di-bitung-perkeruh-konflik-rumah-ibadah>, diakses pada 09 Agustus 2018.

Pada Pilkada Depok, konflik pendirian gereja menjadi konteks yang dikaitkan dalam menciptakan isu agama. Kota Depok memiliki pengalaman konflik pendirian gereja yang melibatkan pemerintah kota dan warga. Konflik yang masih berjalan hingga tahun 2017 ini, berawal pada penolakan terhadap pendirian tempat ibadah dan gedung serbaguna atas nama Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada tahun 2008.<sup>55</sup> Penolakan terhadap pendirian gereja ini berawal dari dicabutnya IMB oleh Walikota Depok pada tahun 2009. Namun pada 2010, IMB didapat kembali setelah pihak Gereja memangkan gugatan di MA. Namun ketika pembangunan hendak dilanjutkan ratusan warga yang mengatasnamakan sebagian umat muslim menolak pembangunan gereja tersebut.<sup>56</sup> Konteks ini menjadi sumber dalam menciptakan *black campaign* kepada Dimas-Babai.

Pilgub Jawa Barat dinilai rentan dengan isu agama karena Jabar merupakan salah satu provinsi dengan tingkat toleransi paling rendah dibanding provinsi lainnya (pada tahun 2016 dan 2017).<sup>57</sup> Jabar juga tidak lepas dari sentimen Islam-Kristen yang terefleksi pada masalah pembangunan gereja di beberapa kabupaten/kota di Jabar. Hal ini juga dapat diamati pada situasi Pilwali Bekasi tahun 2018. Pada maret 2017, sekelompok massa yang mengatasnamakan kelompok umat Islam menolak adanya pembangunan Gereja Santa Clara yang terletak

di Bekasi Utara.<sup>58</sup> Hal ini juga menjadikan Pilwali Bekasi juga diwarnai dengan isu agama.

### ***Konteks Kompetitor (Latar Belakang Agama Kandidat)***

Identitas keagamaan kandidat menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam memunculkan isu agama, apalagi jika kandidat berasal dari agama minoritas. Hal ini dapat dilihat pada pilwali Kota Surakarta, Pilkada DKI Jakarta, Pilgub Sumut, dan Pilgub Jabar. Salah satu calon petahana FX Hady Rudyatmo beragama Katolik, sedangkan mayoritas warga Solo memeluk agama Islam. Kemudian di Pilkada DKI Jakarta, Ahok adalah calon petahana dengan latar belakang Tionghoa-Protestan. Penolakan dengan isu agama terhadap Ahok juga disuarakan dalam beberapa media kampanye, seperti spanduk, selebaran, dan media sosial. Selanjutnya adalah pada Pilgub Sumut dimana isu agama digunakan untuk menyerang pasangan Djarot-Sahar Sitorus karena cawagub Sihar Sitorus beragama Kristen. Sedangkan pada pilgub Jabar, isu agama menyerang Pasangan Dedy Mizwar-Dedi Mulyadi, dimana Dedi Mulyadi dinilai bertentangan dengan Islam karena dianggap sebagai penghayat kepercayaan lokal dan selama menjadi bupati Purwakarta banyak membangun patung (dinilai bertentangan dengan ajaran Islam).

Penjelasan soal konten dan konteks menunjukkan bahwa isu agama (konten) diproduksi dalam kaitannya dengan dua konteks yang berkembang. Konteks yang paling memungkinkan untuk memproduksi isu agama adalah adanya kandidat yang berasal dari latar belakang agama minoritas. Konteks ini berkaitan dengan konten untuk mengajak pemilih memilih pemimpin yang seagama, atau melarang pemilih untuk memilih pemimpin yang berbeda agama. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana yang terjadi pada kasus FX Hady Rudyatmo, Ahok, maupun Sihar Sitorus. Hal lain yang juga dapat dicermati adalah, upaya mengasosiasikan latar

<sup>55</sup> Kompas.com. "IMB Gereja HKBP Depok Dicabut," 29 April 2009, <https://regional.kompas.com/read/2009/04/29/1227410/IMB.Gereja.HKBP.Depok.Dicabut>, diakses pada 09 Agustus 2018.

<sup>56</sup> Okezone.com. "Penolakan Gereja HKBP Cinere Bukan dari FPI," 19 September 2010, <https://news.okezone.com/read/2010/09/19/338/373619/penolakan-gereja-hkbp-cinere-bukan-dari-fpi>, diakses pada 09 Agustus 2018.

<sup>57</sup> Dalam Laporan Wahid Foundation tahun 2016 menyebutkan Jawa Barat sebagai daerah yang paling tinggi kasus pelanggaran kebebasan beragama dengan 28 Peristiwa. Sedangkan Setara Institute pada tahun 2017 juga menempatkan Jawa Barat sebagai daerah yang tingkat pelanggaran kebebasan beragama tinggi, dengan 29 kasus. Lihat: Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan, *Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2016*. (Jakarta: Wahid Foundation, 2016); Ringkasan Eksekutif, *Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia Tahun 2017*. (Jakarta: SETARA Institute, 2017).

<sup>58</sup> Kompas.com. "Keteguhan Wali Kota Bekasi Pertahankan Gereja Santa Clara," 25 Maret 2017, <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/25/08254701/keteguhan.wali.kota.bekasi.pertahankan.gereja.santa.clara>, diakses pada 09 Agustus 2018.

kepemimpinan atau personalitas kandidat dengan kesan negatif dan bertentangan dengan moralitas public. Contohnya seperti tuduhan Ridwan Kamil yang pro LGBT, atau Dedi Mulyadi yang dianggap kebijakannya yang bertentangan dengan Islam karena banyak membangun patung.

Sedangkan konteks sosial-politik di level lokal, menjadi pra-kondisi, sumber atau “bahan baku” dalam memproduksi isu-isu agama. Kecenderungan pada konteks sosial politik adalah pada konten jenis *black campaign*. Persoalan atau konflik agama yang berkembang sebelum penyelenggaraan pilkada (konteks), dihubungkan dengan isu-isu (konten) untuk mendiskreditkan lawan politik.

## Penutup

Sepanjang penyelenggaraan pilkada serentak paa tahun 2015 hingga 2017, dari 901 pilkada yang diselenggarakan, terdapat 7 pilkada yang diwarnai isu agama. Dalam strategi *marketing* politik, ada dua jenis isu agama (konten) yang muncul, yakni: pertama, ajakan untuk memilih kandidat yang seagama, atau tidak memilih kandidat yang tidak seagama; kedua, adalah *black campaign* (hujatan, fitnah atau informasi yang belum jelas kebenarannya).

Produksi isu agama (konten) tidak lepas dari dua konteks: sosial-politik di level lokal/daerah dan konteks kompetitor dalam pilkada. Konteks sosial politik di level lokal, berkaitan dengan konteks historis atau pengalaman konflik terkait agama di masa lalu. Persoalan atau konflik agama yang pernah berkembang sebelum penyelenggaraan pilkada (konteks), dihubungkan dengan isu-isu (konten) untuk mendiskreditkan lawan politik. Dalam konteks ini, konten isu agama digunakan melalui *black campaign*. Bentuknya bisa sangat beragam, ada yang menggunakan spanduk, selebaran, maupun kampanye negatif melalui media sosial. Konteks ini dapat dilihat misalnya pada pilkada Jabar dan Depok.

Sedangkan konteks kompetitor, muncul biasanya jika terdapat salah satu calon kepala daerah yang mempunyai latar belakang minoritas. Identitas minoritas kandidat menjadi sumber untuk memproduksi isu agama. Dalam konteks ini, isu agama yang muncul misalnya

berupa larangan memilih pemimpin dari latar belakang minoritas. Konteks ini misalnya muncul di Pilgub DKI Jakarta dan Pilwali Surakarta. Penjelasan ini menunjukkan bahwa isu agama muncul di sepanjang penyelenggaraan pilkada 2015-2018 dengan cara, bentuk dan pola dimana konten dan konteks saling berkaitan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Aspinall, E. dan Greg Fealy (eds). *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia*. New York: Cornell Univ Press, 1978.
- Dalton, Russell J. *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Western Democracies*. 2nd ed. London: Chatham House, 1996.
- Effendy, Bactiar. *Islam and State in Indonesia*: Singapore: ISEAS, 2003.
- Emmerson, Donald K. *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1976.
- Erman, E. “Indikasi Patrimonialisme dan Klientalisme dalam Proses Pilkada”, dalam Syarif Hidayat dan Hari Susanto (eds.), *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasca Pilkada*. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Feith, Herbert. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Popuuler Gramedia, 1999.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
- Inglehart, Ronald. *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton: Princeton University Press, 1990.
- King, Dwight Y. *Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*. Westport, CT: Praeger, 2003.
- Lees-Marshment, Jennifer. *Introduction in Political Marketing: Principles and Applications*. London and New York: Routledge, 2009.
- Liddle, R. William. *Ethnicity, Party and Natinal Integration: An Indonesian Case Study*. New Haven dan London: Yale University Press, 1970.
- Liddle, R.W. “Memperbaiki Mutu Demokrasi: Sumbangan Ilmu Politik” dalam Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean

- (eds.). *Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan*. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2012.
- Lipset, Seymour Martin. *Political Man: The Social Bases of Politics*. New York: Feffer and Simon Inc, 1960.
- Mujani, S., R. W. Liddle dan K. Ambardi. *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan, 2012.
- Mujani, S., R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. "Voting Behavior in Indonesia since Democratization", dalam *Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Nordholt, H. S. "Desentralisasi di Indonesia: Peran Negara Kurang Lebih Demokratis?" dalam John Harris, Kristian Stokke dan Olle Tornquist (eds.). *Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos, 2005.
- Smidt, Corwin E, Kevin den Dulk, Brian Froehle, James Penning, Stephen Monsma, dan Douglas Koopman. *The Disappearing God Gap?: Religion in the 2008 Presidential Election*. New York: Oxford University Press. 2010.
- Suparlan, Parsudi. Pengantar dalam Clifford Geertz, ed. *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1982.
- Jurnal**
- Aminuddin, M. Faishal dan Moh. Fajar Shodiq Ramadhan. "Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009", *Jurnal Politik*, vol. 1, no. 1, (2015).
- Baines, Paul dan Richard Lynch, "The Context, Content and Process of Political Marketing Strategy", *Journal of Political Marketing*, vol. 4, 2-3, (Oktober 2005).
- Baswedan, Anies Rasyid. "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory", *Asian Survey*, vol. 44, no. 4, (2004).
- Beyers, Jaco, "Religion as Political Instrument: The case of Japan and South Africa", *Journal for the Study of Religion*, vol. 28, no. 1, (2015).
- Burhani, M. Najib. "Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan", *Jurnal Maarif*, vol. 11, no. 2, (Desember 2016).
- Layman, Geoffrey C. "Religion and Political Behavior in the United States: The Impact of Beliefs, Affiliations, and Commitment From 1980 to 1994", *The Public Opinion Quarterly*, vol. 61, no.2 (Summer 1997).
- Lev, Daniel S. "Political Parties in Indonesia", *Journal of Southeast Asian History*, vol. 8, no. 1, (1967).
- Liddle, R.W. "New Patterns of Islamic Politics in Democratic Indonesia", dalam *Asia Program*, no. 110, Washington, D.C: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2003.
- Lijphart, Arend. "Religious vs. Linguistic vs. Class Voting: The "Crucial Experiment" of Comparing Belgium, Canada, South Africa, and Switzerland", *The American Political Science Review*, vol.73, no.2, (1979).
- Masaaki, Okamoto dan Jun Honna. "Intorudction: "Local" Politics in Jakarta: Anomaly from Indonesia's Local Politics?", *Journal of Current Sutehast Asian Affairs*, 33, 1, (2014).
- Mietzner, Marcus dan Burhanuddin Muhtadi. "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation", *Asian Studies Review*, vol. 42, issue 3, (2018).
- Mujani, S dan R. W. Liddle. "Indonesia: Personalities, Parties, and Voters", *Journal of Democracy*, vol. 21, no. 2, (April 2010).
- Norris, Pippa dan Ronald Inglehart. "Islamic Culture and Democracy: Testing the 'Clash of Civilizations' Thesis", *Comparative Sociology*, vol.1, issue 3-4, (2002).
- O'Cass, Aron dan Anthony Pecotich, "The Dynamics of Voter Behavior and Influence Processes in Electoral Markets: A Consumer Behavior Perspective", *Journal of Business Research*, vol. 58, 4, (April 2005).
- O'Cass, Aron. "The External-Internal Orientation of Political Party: Social Implications Of Political Party Marketing Orientation", *Journal of Public Affair*, vol. 1, no. 2, (2001).
- Panagopoulos, Costas dan Peter L. Francia, "Grassroots Mobilization in the 2008 Presidential Election", *Journal of Political Marketing*, vol. 8, 4, (2009).
- Reeves, Peeter. "Local Political Marketing in the Context of the Conservative Party", *Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing*, vol. 25, 2, (2013).
- Sharma, Rakesh, Lauren Serpe, dan Astri Suryandari. *Indonesia Electoral Survey 2010 November 2010*. Washington, D.C.: IFES for the Australian Agency for International Development (USAID), 2010.
- Smidt, Corwin E. "The Role of Religion in the 2016 American Presidential Election", *Journal for Religion, Society and Politics*, vol. 1, issue 1, (2017).

Whitehead, Andrew L., Samuel L. Perry, dan Joseph O. Baker. "Make America Christian Again: Christian Nationalism and Voting for Donald Trump in the 2016 Presidential Election", *Sociology of Religion*, vol.79, issue 2, (2018).

### Dokumen dan Laporan Penelitian

Ringkasan Eksekutif: Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2017. Jakarta: SETARA Institute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila, 2017.

The American Marketing Association. "The American Marketing Association Releases New Definition for Marketing," 2008. dalam <https://archive.ama.org/archive/aboutama/documents/american%20marketing%20association%20releases%20new%20definition%20for%20marketing.pdf>.

Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan. *Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: Wahid Foundation, 2016.

Ringkasan Eksekutif. *Penelitian Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Jawa Barat Dan Aceh Singkil*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017.

Ringkasan Eksekutif. *Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: SETARA Institute, 2017.

Laporan Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), "3 Tahun Jokowi: Kenaikan Elektoral & Kepuasan Publik", September 2017 dalam [https://www.csis.or.id/uploaded\\_file/event/pemaparan\\_hasil\\_survei\\_opini\\_publik\\_tiga\\_tahun\\_pemerintahan\\_joko\\_widodo\\_jusuf\\_kalla\\_kinerja\\_pemerintahan\\_dan\\_peta\\_politik\\_nasional\\_notulen.pdf](https://www.csis.or.id/uploaded_file/event/pemaparan_hasil_survei_opini_publik_tiga_tahun_pemerintahan_joko_widodo_jusuf_kalla_kinerja_pemerintahan_dan_peta_politik_nasional_notulen.pdf).

Lingkar Survei Indonesia, "Faktor Agama Dalam Pilkada", *Kajian Bulanan LSI*, Edisi 10, Februari 2008

Surat Keputusan KPU Sulawesi Utara, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

Surat Keputusan KPU Kota Depok, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2015.

Surat Keputusan KPU Kota Surakarta, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2015

### Sumber Online

Beritasatu.com. "Isu SARA Diduga Kotori Pilgub Sulawesi Utara" dalam <http://www.beritasatu.com/nasional/326205-isu-sara-diduga-kotori-pilgub-sulawesi-utara.html>.

Cnnindonesia.com. "Perang Spanduk SARA Jelang Pemungutan Suara" 6 April 2017, dalam <https://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki/20170406081402-516-205324/perang-spanduk-sara-jelang-pemungutan-suara/>.

Cnnindonesia.com. "PGI: Surat Perjanjian Wali Kota Bekasi Dengan Gereja Palsu," 25 Juni 2018 dalam <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180625121702-32-308811/pgi-surat-perjanjian-wali-kota-bekasi-dengan-gereja-palsu?>.

Detik.com. "Gerakan Subuh Berjamaah: Strategi Menangkan Cagub Edy Rahmayadi" dalam <https://news.detik.com/berita/d-4062265/gerakan-subuh-berjamaah-strategi-menangkan-cagub-edy-rahmayadi>.

Jppn.com. "Sosok Dedy Mulyadi dan Isu Agama di Pilgub Jabar," dalam <https://www.jppn.com/news/sosok-dedy-mulyadi-dan-isu-agama-dipilgub-jabar>.

KPU RI, 2018. <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/report/penetapan/list/nasional> diakses pada 09 Agustus 2018.

Kompas, "Pilkada Serentak Pembelajaran Demokrasi." 13 Februari 2017.

Kompas.com. "IMB Gereja HKBP Depok Dicabut," 29 April 2009 dalam <https://regional.kompas.com/read/2009/04/29/1227410/IMB.Gereja.HKBP.Depok.Dicabut>.

Kompas.com. "Akhirnya, FX Rudy Komentari Isu SARA yang Sempat Menerpanya." 10 Desember 2015 dalam <https://regional.kompas.com/read/2015/12/10/12421661/Akhirnya.FX.Rudy.Komentari.Isu.SARA.yang.Sempat.Menerpanya>.

- Kompas.com. "Pilkada Depok, Dimas-Babai Diserang Isu SARA Lewat Spanduk" 10 November 2015 dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/10/12373471/Pilkada.Depok.Dimas-Babai.Diserang.Isu.SARA.lewat.Spanduk>.
- Kompas.com. "Survei CSIS: Waga DKI Menyukai Kepribadian Ahok, Setelah Itu Prestasinya." 25 Januari 2016 dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/01/25/13105041/Survei.CSIS.Warga.DKI.Menyukai.Kepribadian.Ahok.Setelah.Itu.Prestasinya>.
- Kompas.com. "Keteguhan Wali Kota Bekasi Pertahankan Gereja Santa Clara." 25 Maret 2017 dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/25/08254701/keteguhan.wali.kota.bekasi.pertahankan.gereja.santa.clara>.
- Kompas.com. "Infografis: Fakta Seputar Pilkada Serentak." 23 Juni 2018 dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/23/21473321/infografis-fakta-seputar-pilkada-serentak-2018>.
- Kompas.com. "Hasil Rekapitulasi KPU Bekasi: Pepen-Tri Menang dari Nur-Adhy." 6 Juli 2018 dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/06/18525211/hasil-rekapitulasi-kpu-bekasi-pepen-tri-menang-dari-nur-adhy>.
- Liputan.6.com. "Ridwan Kamil: Isu Dukungan Kaum LGBT Bentuk Kampanye Hitam." dalam <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3299863/ridwan-kamil-isu-dukungan-kaum-lgbt-bentuk-kampanye-hitam>.
- Okezone.com. "Penolakan Gereja HKBP Cinere Bukan dari FPI." 19 September 2010 dalam <https://news.okezone.com/read/2010/09/19/338/373619/penolakan-gereja-hkbp-cinere-bukan-dari-fpi>.
- Republika.co.id. "Penolakan Masjid di Bitung Perkeruh Konflik Rumah Ibadah." 11 November 2015 dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/11/nxmrie365-penolakan-masjid-di-bitung-perkeruh-konflik-rumah-ibadah>.
- Tirto.id. "Faktor yang Membuat Djarot Kalah dari Edy di Pilgub Sumut 2018." dalam <https://tirto.id/faktor-yang-membuat-djarot-kalah-dari-edy-di-pilgub-sumut-2018-cM7n>.

## TENTANG PENULIS

### **Aisah Putri Budiatri**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui [aisahputrib@gmail.com](mailto:aisahputrib@gmail.com).

### **Agus Sutisna**

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Muhamadiyah Tangerang. Menyelesaikan pendidikan doctoral di Universitas Nasional, Jakarta. Saat ini penulis menjadi anggota KPU Provinsi Banten periode 2018-2023. Aktif menulis tentang pemilihan dan demokrasi di berbagai jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [tisna\\_1965@ymail.com](mailto:tisna_1965@ymail.com).

### **Firman Noor**

Penulis merupakan peneliti senior sekaligus professor riset pada Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia, S2 di Australian National University dan S3 di Universitas Exeter, Inggris. Karya-karya akademisnya banyak diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional maupun buku terkait pemilihan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui Email: [firman.noor@yahoo.co.id](mailto:firman.noor@yahoo.co.id).

### **Idil Akbar**

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Padjajaran, Bandung. Menyelesaikan pendidikan master Ilmu Politik di FISIP Universitas

Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: [idil.akbar@gmail.com](mailto:idil.akbar@gmail.com)

### **Kurniawati Hastuti Dewi**

Penulis adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2007 menyelesaikan program master dari Faculty of Asian Studies Australian National University dan mendapat gelar doktor dari Kyoto University Jepang tahun 2012. Memiliki passion dalam bidang gender dan politik, kepemimpinan perempuan, gender dan desentralisasi, hak-hak asasi perempuan dan anak serta gender, Islam dan demokrasi di Indonesia. Berbagai tulisan akademis telah diterbitkan dalam jurnal nasional, internasional dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [kurniawati.dewi@yahoo.com](mailto:kurniawati.dewi@yahoo.com).

### **Lili Romli**

Penulis merupakan peneliti senior dan professor riset di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan doctoral ilmu politik di FISIP Universitas Indonesia. Kajian yang diminati penulis adalah tentang pemilihan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui: email: [liliromli.lipi@gmail.com](mailto:liliromli.lipi@gmail.com)

### **M. Fajar Shodiq Ramadhan**

Penulis merupakan pengajar pada Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Airlangga, Surabaya. Beberapa karya tulisnya tentang pemilihan telah dimuat dalam berbagai jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui email: [fajarramadhan@ub.ac.id](mailto:fajarramadhan@ub.ac.id).

### **Moch Nurhasim**

Adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas

Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [hasim\\_nur@yahoo.com](mailto:hasim_nur@yahoo.com).

### **Mouliza K.D Sweinstani**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: [moulizadonna@gmail.com](mailto:moulizadonna@gmail.com).

### **Romel Masykuri**

Penulis merupakan mahasiswa program magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga. Dapat dihubungi melalui email: [romel.masykuri@gmail.com](mailto:romel.masykuri@gmail.com)

### **Ridho Imawan Hanafi**

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Melanjutkan S2 di Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia. Sebelum di LIPI, penulis bekerja sebagai peneliti di Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta (2008-2014). Kajian yang diminati adalah demokrasi, partai politik, dan pemilu. Penulis dapat dihubungi melalui surel [ridhoimawan@gmail.com](mailto:ridhoimawan@gmail.com).

### **Sri Budi Eko Wardani**

Penulis adalah pengajar di departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Pernah menjadi Direktur Eksekutif Puskapol UI. Kajian peminatan penulis adalah tentang kepemiluan, perempuan dan perwakilan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: [sbe\\_wardani@yahoo.com](mailto:sbe_wardani@yahoo.com).

### **Sri Yanuarti**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru*, *Beranda Perdamaian*, *Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*; *Evaluasi Reformasi Polri dan lain- lain*. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*, *Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*; *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*; *Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia*, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel [yanuc2000@yahoo.com](mailto:yanuc2000@yahoo.com).

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

